

BAB II KAJIAN TEORI

A. Manajemen Kurikulum

1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen secara etimologis berasal dari kata *managio* yang berarti kepengurusan atau *managaire*, yaitu melatih dalam mengatur langkah-langkah.¹ Dalam hal ini, manajemen bisa diartikan sebagai seni, ilmu, dan profesi. Follet mendukung pernyataan tersebut dengan mengartikan manajemen sebagai seni, karena untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, seorang manajer harus bisa mengatur dan menggerakkan orang untuk melakukan tugas-tugasnya. Berbeda dengan pendapat Gulick yang mengartikan manajemen sebagai ilmu dan profesi. Gulick memandang manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami dan bagaimana orang bekerja sama, juga dikatakan sebagai suatu profesi karena untuk menjadi manajer seseorang membutuhkan keahlian khusus dan profesional.²

Sedangkan kurikulum berasal dari Bahasa Latin *Curriculum*, yang berarti *a running course, specially a chariot race course*, atau Bahasa Prancis *Courir*, artinya *to run* yaitu berlari. Istilah ini digunakan untuk sejumlah *course* atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah.³ Dalam Pendidikan Islam, kurikulum dikenal dengan kata *Manhaj*, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka.⁴

Abdul Qadir Yusuf dalam kitabnya *At-Tarbiyyah Wal Mujtami'* mendefinisikan kurikulum sebagai berikut:

¹ Mukhamad Ilyasin dan Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2012), 59.

² Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 1.

³ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 29.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1468.

المنهج في التربية الحديثة بأنه مجموعة خبرات وتجارب تعلم الاطفال تحت إرشاد المدرسة

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman dan uji coba dalam proses belajar mengajar siswa di bawah bimbingan lembaga (sekolah)."

Definisi kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli cenderung beraneka ragam, namun dari berbagai pengertian tersebut, semuanya mengandung kebenaran. Definisi mana yang cocok untuk kita pakai itu tergantung pada kondisi dan situasi. Peneliti menggunakan pengertian kurikulum dari Hilda Taba yang mendefinisikan kurikulum sebagai pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus, dan materinya dipilih dan diorganisasikan atau ditata berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Demikian juga pernyataan Robert Gagne yang sejalan dengan pernyataan dari Hilda Taba yang mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rangkaian unit materi belajar yang disusun sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mempelajarinya berdasarkan kemampuan awal yang dimiliki sebelumnya.⁵ Dengan demikian, kurikulum harus mencerminkan pengertian umum tentang peristilahan pendidikan sebagaimana sering digunakan oleh pendidik. Kurikulum juga harus bermanfaat bagi guru dalam membuat perencanaan pengajaran yang baik bagi peserta didik.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁶

Berbagai tafsiran tentang kurikulum dapat ditinjau dari segi lain, sehingga diperoleh penggolongan sebagai berikut:

- a. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya

⁵ Famahato Lase, "Dasar Pengembangan Kurikulum Menjadi Pengalaman Belajar", *Jurnal PG-PAUD STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai*, Vol.1 No.2, (2015), 133.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 9.

dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan.

- b. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Biasanya berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, dan lain-lain.
- c. Kurikulum sebagai pengalaman siswa, pandangan ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada tiap siswa. Ada kemungkinan bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana.⁷

Dengan demikian, pengertian sederhana dari kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

2. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Ruang lingkup manajemen kurikulum itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kurikulum sekarang lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada.⁸

Menurut Kholid Musyaddad, ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut:⁹

- a. Manajemen perencanaan
- b. Manajemen pelaksanaan kurikulum
- c. Supervisi pelaksanaan kurikulum

⁷ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 8.

⁸ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 5.

⁹ Muhammad Kristiawan, dkk., *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 78.

- d. Pemantauan dan penilaian kurikulum
- e. Perbaikan kurikulum.

Berbeda dengan yang dirumuskan oleh Lestari, bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu terdiri dari:¹⁰

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pelaksanaan
- d. Evaluasi atau penilaian.

Pada dasarnya, kedua pendapat di atas hampir sama. Pendapat yang pertama bersifat khusus, lebih menekankan kepada aspek operasional yang berkaitan dengan KTSP, sedangkan pendapat yang kedua lebih umum dan dianggap lebih sesuai dengan dengan konteks penelitian. Meskipun demikian, berikut ini akan diuraikan secara singkat ruang lingkup manajemen kurikulum dari kedua pendapat di atas agar pemahaman kita tentang manajemen kurikulum bisa lebih luas.

Berikut ini ruang lingkup manajemen kurikulum yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kurikulum

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.

Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan pertama dalam proses manajemen. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, 20.

Perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen lembaga pendidikan. Di samping itu, perencanaan kurikulum juga berfungsi sebagai pendorong untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.¹²

Perencanaan kurikulum berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran disusun sehingga peserta didik atau siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Semua materi dan kegiatan belajar perlu direncanakan dan disusun sebaik-baiknya agar terbentuk program belajar mengajar yang sistematis. Oleh karena itu, guru sebagai manajer pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan. Guru harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber, baik sumber daya, sumber dana, maupun sumber belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh siswa sehingga siswa memahami apa yang telah diajarkan.¹³

b. Pengorganisasian Kurikulum

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya diantara anggota organisasi. Menurut Terry, pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses.¹⁴

Pengorganisasian kurikulum yang dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum. Salah satunya

¹² Ibid., 21.

¹³ Ibid., 22.

¹⁴ Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: LPPPI, 2017), 26.

prinsip relevansi, dimana adanya kesesuaian antara komponen tujuan, isi/pengalaman belajar, dan evaluasi kurikulum, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, kurikulum itu memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Pengorganisasian ini merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan yang telah tersusun sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian ini akan menghasilkan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan menurut rencana yang telah ditentukan pula. Pengorganisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum, diantaranya:

- 1) Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antar aspek masyarakat.
- 2) Kontinuitas kurikulum, dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa.
- 3) Keseimbangan bahan pelajaran, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus terjadi.
- 4) Alokasi waktu, dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Maka dalam penetapan ini, jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang terpenting sebelum menetapkan bahan pelajaran.¹⁵

c. Pelaksanaan Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya,

¹⁵ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, 61.

kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri.¹⁶

Pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran, semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, dan alat akan di uji. Dalam kegiatan ini, ada dua hal yang dilaksanakan:

- 1) Pembagian tugas bimbingan dalam belajar yang meliputi: penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) berdasarkan kesepakatan antara pembimbing dan peserta didik, menyusun jadwal pelajaran, dan pengisian kemajuan siswa.
- 2) Pembinaan ekstra kurikuler yang memenuhi bakat dan minat, memenuhi kebutuhan kelompok, memberi pengalaman eksploratif, mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial, mengembangkan sifat-sifat tertentu, menyediakan waktu untuk bimbingan informal, dan mengembangkan citra masyarakat terhadap sekolah.¹⁷

Kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatankurikulum yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata (*actual curriculum-curriculum in action*). Kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai guru dalam mengimplementasikan kurikulum adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum.
- 2) Kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik.
- 3) Kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran.¹⁸

¹⁶ Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 151.

¹⁷ Ibid., 155.

¹⁸ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, 74.

Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan kemampuan-kemampuan tersebut, perlu ada kegiatan yang bersifat peningkatan atau penyegaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui diskusi-diskusi, simulasi dalam grup, atau MGMP/KKG, Selain dilakukan melalui loka karya, pelatihan, atau penataran intern dengan mendatangkan narasumber.

d. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum ialah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi kurikulum tersebut dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program.¹⁹

Evaluasi kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatian pada program-program pendidikan untuk anak didik. Lingkup evaluasi pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan program. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, dan cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya.

Evaluasi kurikulum ini bukan hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dan proses pembelajarannya, tetapi juga desain dan implementasi kurikulum, kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, fasilitas dan sumber belajar lainnya. Kurikulum sebagai program pendidikan atau program belajar untuk siswa memerlukan

¹⁹ Ibid, 91.

penilaian sebagai bahan balikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, anak didik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengawasan atau evaluasi ini bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang ditetapkan. Dalam proses manajerial yang terakhir ini, guru sebagai manajer pembelajaran harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.²⁰

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap berbagai komponen pokok yang ada dalam kurikulum, di antara komponen yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi tujuan pendidikan, merupakan evaluasi terhadap tujuan setiap mata pelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya, baik terhadap tingkat perkembangan siswa maupun ketercapaiannya dengan visi-misi lembaga pendidikan.
- 2) Evaluasi terhadap isi/materi kurikulum, merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh pokok bahasan yang diberikan dalam setiap mata pelajaran untuk mengetahui ketersesuaiannya dengan pengalaman, karakteristik lingkungan, serta perkembangan ilmu dan teknologi.
- 3) Evaluasi terhadap strategi pembelajaran, merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terutama di dalam kelas guna mengetahui apakah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik.
- 4) Evaluasi terhadap Program Penilaian, merupakan evaluasi terhadap program penilaian yang dilaksanakan guru selama pelaksanaan

²⁰ Departemen Agama, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Pendidikan Islam, 2005), 28.

pembelajaran baik secara harian, mingguan, semester, maupun penilaian akhir tahun pembelajaran.²¹

3. Fungsi Manajemen Kurikulum

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Fungsi kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan pendidikan yang telah diadakan pada sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.²²

Adapun fungsi kurikulum ditinjau dari objeknya adalah:

a. Fungsi kurikulum bagi guru

Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Bagi guru, sebelum mengajar pertama-tama yang perlu dipertanyakan adalah kurikulumnya. Setelah kurikulum didapat, kemudian guru mencari silabus dan selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran, dan selanjutnya barulah guru mencari berbagai sumber bahan yang relevan atau yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sesuai dengan fungsinya, kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka guru harus mencermati tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan tempat guru tersebut bekerja.

b. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah

Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan supervisi kurikulum terhadap para guru pemegang mata pelajaran. Bagi kepala sekolah baru, yang dipelajari pertama kali adalah tujuan lembaga yang akan dipimpinnya. Kemudian, kepala sekolah baru tersebut mencari kurikulum yang berlaku sekarang untuk

²¹ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, 80.

²² Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), 12.

dipelajari, terutama pada buku petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya, kepala sekolah bertugas melaksanakan supervisi atau bimbingan pengarahannya kurikulum pada para guru, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa.

c. Fungsi kurikulum bagi masyarakat

Fungsi kurikulum bagi masyarakat adalah untuk mendorong sekolah agar dapat menghasilkan berbagai tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kurikulum merupakan alat produsen dari sekolah, sedangkan masyarakat adalah konsumennya. Antara kurikulum sebagai produsen dengan masyarakat sebagai konsumennya harus sinkron.²³

4. Komponen Manajemen Kurikulum

Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka hal ini berarti kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut sebagai komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan.²⁴

Menurut Ramayulis, komponen kurikulum itu meliputi:

- a. Tujuan yang ingin dicapai, meliputi tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara.
- b. Isi kurikulum, berupa materi yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi tersebut disusun ke dalam silabus dan dalam mengaplikasikannya dicantumkan pula dalam satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran.
- c. Media (sarana dan prasarana) pembelajaran.
- d. Bahan ajar sebagai sarana perantara dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik.

²³ Ibid., 13.

²⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 152.

- e. Metode pembelajaran, komponen ini merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Suatu metode mengandung pengertian terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Metode dilaksanakan melalui prosedur tertentu.
- f. Proses pembelajaran, komponen ini sangat penting sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum.
- g. Evaluasi, dengan evaluasi (penilaian) dapat diketahui cara pencapaian tujuan.²⁵

5. Kurikulum Pendidikan Diniyah

Kurikulum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis. Meskipun bukan satu-satunya faktor utama keberhasilan proses pendidikan, kurikulum menjadi petunjuk dan arah terhadap keberhasilan pendidikan. Kurikulum menjadi penuntun (*guide*) para pelaksana pendidikan dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuannya dalam mengembangkan dan menjabarkan berbagai materi dan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan yang baik adalah yang mampu memahami kurikulum dan mengimplementasikannya pada proses pembelajaran.

Kurikulum muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyah pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten Jombang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019. Dalam peraturan bupati tersebut dijelaskan bahwa muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyah bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas spiritual yang mendasari sikap dan perilaku, baik di satuan pendidikan dasar maupun di masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019, ada beberapa pasal yang menjelaskan khusus tentang kurikulum pendidikan diniyah:

²⁵ Ibid., 154-155.

- a. Dalam Bab III Pasal 5 dijelaskan bahwa muatan lokal Pendidikan Diniyah merupakan muatan lokal wajib pada SD dan SMP dan menjadi salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- b. Dalam Bab III Pasal 6 dijelaskan bahwa pada muatan lokal Pendidikan Diniyah setiap peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki kemampuan Al-Qur'an, Tajwid, Fiqih-Syari'ah, Aqidah-Tauhid, dan Akhlak.
- c. Dalam Bab IV Pasal 9 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan muatan lokal Pendidikan Diniyah pada jenjang SD dan SMP digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kelulusan peserta didik dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Dinas.
- d. Dalam Bab IV Pasal 10 dijelaskan bahwa silabus disusun berdasarkan kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Diniyah sekaligus silabus tersebut ditetapkan oleh Peraturan Kepala Dinas dan pembimbing Muatan Lokal Pendidikan wajib menyusun rencana pelaksanaan pembimbingan berdasarkan silabus.
- e. Dalam Bab V tentang Struktur Kurikulum Pasal 12 dijelaskan bahwa beban belajar muatan lokal Pendidikan Diniyah pada jenjang SD adalah 64 jam pelajaran dalam satu semester atau 4 jam pelajaran dalam satu minggu. Sedangkan beban belajar muatan lokal Pendidikan Diniyah pada jenjang SMP adalah 32 jam pelajaran dalam satu semester atau 2 jam pelajaran dalam satu minggu. Adapun beban belajar dalam satu minggu itu dilaksanakan dalam bentuk kurikuler.
- f. Dalam Bab VI tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah Pasal 14 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik pembimbing muatan lokal Pendidikan Diniyah sekurang-kurangnya berijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Dalam hal kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud belum dapat dipenuhi, maka dapat dipenuhi pembimbing dengan kualifikasi setara SMA dan/atau lulusan Muallimin/Muallimat

dan/atau lulusan Pesantren Muadalah yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi materi Muatan Lokal Pendidikan Diniyah.

B. Muatan Lokal

1. Pengertian Muatan Lokal

Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa. Isi dalam pengertian tersebut adalah bahan pelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan muatan lokal. Sedangkan media penyampaiannya merupakan metode dan sarana yang digunakan dalam penyampaian muatan lokal.²⁶

Menurut E. Mulyasa, muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.²⁷ Sedangkan di daerah Jombang, muatan lokal yang diterapkan sudah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, yaitu muatan lokal pendidikan diniyah, mengingat kota Jombang adalah kota yang diberi julukan kota santri, dimana santri merupakan peserta didik yang mampu menguasai ilmu keagamaan.

Pendapat tersebut didukung dengan pendapat Lim Wasliman mengenai kurikulum muatan lokal. Lim Wasliman mengungkapkan bahwa kurikulum muatan lokal adalah suatu program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah.²⁸ Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat

²⁶ Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 59.

²⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 272.

²⁸ Al Musanna, "Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan di Aceh", *Jurnal Penelitian*, Vol.10 No.2, (Oktober, 2019), 2.

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Jadi, yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Hal ini senada dengan definisi dari muatan lokal yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 0412/U/1987, yaitu sebagai berikut: “Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh siswa di daerah itu”.²⁹

Kurikulum muatan lokal termasuk kegiatan kurikuler (kegiatan yang berkenaan dengan kurikulum) yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Muatan lokal mempunyai jenis materi yang berbeda dengan mata pelajaran lain, sehingga muatan lokal harus menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dan mempunyai alokasi waktu tersendiri.

2. Tujuan Kurikulum Muatan Lokal

Melalui penerapannya, kurikulum muatan lokal dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku siswa, berupa wawasan tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan bekal tersebut, siswa diharapkan mampu mengembangkan serta melestarikan sumber daya alam dan kebudayaan yang ada di sekelilingnya. Tujuan lain dari pemberian pengajaran muatan lokal adalah agar pengembangan sumber daya manusia yang terdapat di daerah setempat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Substansi kurikulum muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan yang

²⁹ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 172.

tidak hanya terbatas pada mata pelajaran keterampilan, tetapi pembentukan sikap yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang merupakan bagian penting yang harus diberikan tempat dalam penerapan kurikulum muatan lokal pada pendidikan formal. Secara lebih khusus, kurikulum muatan lokal bertujuan untuk:

- a. Mengenalkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya.
- b. Membekali peserta didik dengan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.
- c. Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
- d. Menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya.³⁰

3. Landasan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Diniyah

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal dalam konteks pendidikan Indonesia relatif baru. Landasan yuridis pelaksanaan kurikulum muatan lokal mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0412/U/1987. Sebagai penjabarannya tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Nomor 173/-C/Kep/M/1987.³¹ Dalam perkembangannya kemudian, keberadaan muatan lokal bertambah kuat dengan dijadikannya muatan lokal sebagai salah satu isi dan struktur kurikulum yang harus diberikan pada tingkat dasar dan menengah.

Salah satu perkembangan kurikulum muatan lokal saat ini yaitu yang terjadi di daerah Jombang. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 mengenai kurikulum muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyah yang diterapkan pada sekolah dasar dan

³⁰ Muhammad Natsir, "Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di Madrasah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol.10 No.1, (Juni, 2013), 12.

³¹ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, 101.

sekolah menengah pertama di kabupaten Jombang. Maksud dari Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Dinas, Satuan Pendidikan, dan Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah dalam melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah atau nama lain yang sejenis.³²

Adapun muatan lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas spiritual yang mendasari sikap dan perilaku, baik di Satuan Pendidikan Dasar maupun di masyarakat.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 ini berisi tentang muatan lokal yang dibagi menjadi dua, yaitu muatan lokal Keagamaan dan muatan lokal Pendidikan Diniyah. Adapun muatan lokal Keagamaan meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Aliran Kepercayaan. Sedangkan muatan lokal Pendidikan Diniyah dikhususkan bagi yang beragama Islam. Keduanya merupakan muatan lokal wajib pada SD dan SMP, dan keduanya juga menjadi salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.³³

C. Pendidikan Diniyah

1. Pengertian Pendidikan Diniyah

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan pondok pesantren, di Indonesia juga mengenal pendidikan Islam yakni pendidikan madrasah. Madrasah ini merupakan lembaga yang mengajarkan pendidikan khusus ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Pada prosesnya, lembaga ini dinamakan Madrasah Diniyah.

Pada awal abad ke 20, satu persatu mulai bermunculan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang menganut sistem pendidikan yang lebih terprogram dan modern serta dilaksanakan di dalam kelas. Madrasah Diniyah telah diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bahwa Madrasah

³² Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019.

³³ Ibid.

Diniyah merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi keinginan masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah juga merupakan kelompok pendidikan keagamaan jalur nonformal yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina dan diawasi oleh Kementerian Agama. Dalam pendidikan madrasah diniyah, santri dididik sesuai dengan ajaran Islam agar menjadi generasi penerus Islam yang berkualitas dan berakhlak mulia.³⁴

Pendidikan diniyah merupakan model atau sistem pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut untuk menguasai pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam, baik secara formal, non-formal, maupun informal. Sistem pendidikan diniyah di pondok pesantren terbukti telah melahirkan format keilmuan yang multi dimensi, yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran sosial, dan karakter manusia sebagai hamba Allah.³⁵ Pendidikan Diniyahlah sekolah yang mampu mendidikan anak yang berkarakter yang menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 disebutkan tentang perlunya pendidikan agama:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan sistem terbuka.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

³⁴ Anis Fauzi dan Cecep Nikmatullah, "Implementasi Pendidikan Madrasah Diniyah di Kota Serang", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.1, No.2, (Agustus, 2016), 7.

³⁵ Amin Haedari, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), 14.

Menurut pengertian di atas maka pendidikan diniyah dapat berwujud: (1) Segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan/atau menumbuhkembangkan ajaran agama, (2) Segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan/atau tumbuh kembangnya ajaran agama dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.

Meskipun istilah Pendidikan Agama atau Diniyah tersebut dapat dipahami dengan cara yang berbeda, namun pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan mewujudkan secara operasional dalam satu sistem yang utuh. Teori kependidikan diniyah merupakan suatu teori yang dibangun dan berkembang serta dipahami sebagai perwujudan dari Al-Qur'an dan Hadits, yang mendapatkan justifikasi, dan perwujudan secara operasional dalam proses pengembangan ajaran agama, budaya, dan peradaban agama Islam dari generasi ke generasi, yang berlangsung sepanjang sejarah umat Islam dan secara praktis dapat dipahami, dianalisis, dan dikembangkan dari proses pembinaan dan pengembangan (pendidikan) pribadi setiap muslim pada setiap generasi.³⁶

2. Macam-macam Pendidikan Diniyah

Dalam kaitannya dengan satuan pendidikan lain, khususnya sekolah madrasah dan umum, madrasah diniyah bisa dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu:

- a. Madrasah Diniyah wajib, yakni madrasah diniyah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga sekolah umum atau madrasah. Siswa sekolah umum atau madrasah yang bersangkutan wajib menjadi siswa madrasah diniyah. Madrasah diniyah tipe ini biasanya disebut juga sebagai madrasah diniyah komplemen, karena sifatnya komplementatif terhadap sekolah umum atau madrasah.
- b. Madrasah Diniyah pelengkap, yakni madrasah diniyah yang diikuti oleh siswa sekolah umum atau madrasah sebagai upaya untuk menambah dan melengkapi pengetahuan agama sekaligus bahasa Arab yang sudah

³⁶ Ibid., 30.

mereka peroleh di sekolah umum atau madrasah. Madrasah diniyah ini disebut juga madrasah diniyah suplementasi terhadap sekolah umum atau madrasah.

- c. Madrasah Diniyah murni, yakni madrasah diniyah yang siswanya hanya boleh menempuh pendidikan di madrasah diniyah tersebut dan tidak merangkap di sekolah umum maupun madrasah. Madrasah diniyah ini dinamakan madrasah diniyah independen, karena bebas dari siswa yang merangkap di sekolah atau madrasah formal.³⁷

Dalam penelitian ini, pendidikan diniyah yang diajarkan termasuk dalam jenis madrasah diniyah wajib, karena pendidikan diniyah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga sekolah, baik jenjang dasar maupun menengah pertama, dan siswanya wajib untuk mengikuti kurikulum pendidikan diniyah.

³⁷ Departemen Agama, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), 49.